

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti oleh pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Meski demikian, hal itu harus tetap mengacu pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah; hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan

kepada gubernur/walikota/bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada peraturan pengelolaan keuangan daerah yaitu, bahwa gubernur/bupati walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan negara masih terjadi penyimpangan, oleh karena itu, upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*suitable*) sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara.

Tantangan ini telah dijawab melalui langkah konkret dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang disahkan 9 Maret 2003, yang diharapkan dapat menjadi kerangka hukum yang kokoh dalam upaya mendorong terwujudnya tata cara pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi. Penggunaan belanja daerah harus digunakan secara efektif, efisien, dan optimal. Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah atau lembaga teknis daerah. Sedangkan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi,

lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kedua peraturan perundang-undangan ini memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dimana Aparatur Sipil Negara merupakan pelayan masyarakat/abdi negara yang memiliki tanggungjawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dipandang masyarakat dalam menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tingkat kinerja yang dicapai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut. Namun pada kenyataannya masih ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak dapat menjalankan tugas secara maksimal. Maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran kinerja pemerintah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen

perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis Kementerian Negara/Lembaga/Lembaga Strategis SKPD seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2014	31.157.864.575,62	25.598.649.782,00	82,15%
2015	19.313.222.918,58	17.046.748.192,00	88,26%
2016	86.179.136.304,00	75.861.774.557,00	84,12%
2017	138.952.232.060,00	91.795.193.952,00	66,06%
2018	67.498.051.299,78	63.179.499.655,00	93,60%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2019 (data diolah peneliti).

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah yang terjadi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tidak stabil dalam merealisasikan anggaran yang sudah ditentukan, mulai dari belanja pada tahun 2014 anggaran belanja daerah sebesar Rp.31.157.864.575,62 terealisasi sebesar Rp.25.598.649.782,00 atau sebesar 82,15%, tahun 2015 anggaran

belanja daerah sebesar Rp.19.313.222.918,58 terealisasi sebesar Rp.17.046.748.192,00 atau 88,26%, pada tahun 2016 anggaran sebesar Rp.86.179.136.304,00 hanya terealisasi sebesar Rp.75.861.774.557,00 atau 84,12%, pada tahun 2017 anggaran belanja sebesar Rp.138.952.232.060,00 terealisasi Rp.91.795.193.952,00 atau sebesar 66,06% terdapat penurunan persentase yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2018 anggaran belanja sebesar Rp.67.498.051.299,78 terealisasi Rp.63.179.499.655,00 atau sebesar 93,60% .

Tabel 1.2

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung Tahun 2014**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan terlindungi	BCB	371	237	63.88%
2.	Jumlah lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	565	423	74%
3.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	5.807.565	108.00%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	70	42	60%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi hanya terealisasi 237 atau sebesar 63.88%. Jumlah lingkungan seni/budaya yang aktif trealisasi 423 atau sebesar 74%. Jumlah kunjungan wisatawan teralisasi sangat baik yaitu 5.807.565 atau sebesar 108%. Dan indeks kepuasan masyarakat masih belum optimal yaitu hanya 60%.

Tabel 1. 3
Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2014

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dll	1.134.548.000	998.113.375		v
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.920.434.790	2.909.754.790	v	
		Kegiatan fasilitas festival budaya daerah	740.250.000	719.267.410	v	
		Seminar revitalisasi budaya lokal	1.001.140.000	973.449.900	v	

2.	Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya	Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	680.414.3 70	680.314.3 70	v	
3.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kegiatan Sosialisasi Pengelola kekayaan Budaya Lokal daerah	249.612.0 00	189.555.0 00	v	
4.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	554.150.0 00	431.284.3 00	v	
		Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama	715.220.0 00	707.239.7 00	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.3 semua program menunjang pencapaian kecuali program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dan lain-lain belum menunjang pencapaian dengan anggaran Rp. 1.134.548.000 dan realisasi Rp.998.113.375.

Tabel 1.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung Tahun 2015

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan terlindungi	BCB	420	221	52,61%
2.	Jumlah lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	565	423	74%
3.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	4.367.565	81.36%
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	70	35	50%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi hanya terealisasi 221 atau sebesar 52.61%. Jumlah lingkungan seni/budaya yang aktif trealisasi 423 atau sebesar 74%. Jumlah kunjungan wisatawan teralisasi sangat baik yaitu 4.367.565 atau sebesar 81.36%. Dan indeks kepuasan masyarakat masih belum optimal yaitu hanya 50%.

Tabel 1. 5
Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2015

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dll	1.534.211.000	1.321.987.000	v	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	2.725.478.111	2.623.985.124	v	
		Kegiatan fasilitas festival budaya daerah	654.763.000	623.185.000	v	
		Seminar revitalisasi budaya lokal	895.583.600	882.449.900	v	
2.	Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya	Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	680.414.370	680.314.370		
3.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Kegiatan Sosialisasi Pengelola kekayaan Budaya Lokal daerah	571.936.000	341.937.000		v

4.	Program pengembangan nilai budaya	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	448.973.000	418.976.000	v	
		Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama	867.234.000	867.234.000	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.5 semua program menunjang pencapaian kecuali program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan sosialisasi pengelola kekayaan budaya lokal daerah belum menunjang pencapaian dengan anggaran Rp. 571.936.000 dan realisasi Rp. 341.937.000.

Tabel 1.6

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB) dalam kondisi baik dan terlindungi	BCB	371	230	61.99%
2.	Jumlah lingkungan Seni/Budaya yang aktif	Kelompok	565	423	74%

3.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	5.367.894	4.902.565	91.38%
----	----------------------------	-------	-----------	-----------	--------

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.6 dapat dilihat bahwa Jumlah Bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik dan terlindungi hanya terealisasi 230 atau sebesar 61.99%. Jumlah lingkungan seni/budaya yang aktif trealisasi 423 atau sebesar 74%. Jumlah kunjungan wisatawan teralisasi sangat baik yaitu 4.902.565 atau sebesar 91.38%.

Tabel 1. 7

Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2016

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah purbakala, museum, dll	1.335.769. 250	1.293.07 1.229	v	
		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	4.308.340. 000	4.131.95 8.140	v	
		Kegiatan fasilitas festival budaya daerah	1.077.366. 000	1.048.05 5.538	v	
		Seminar revitalisasi	2.291.774.	2.144.65	v	

		budaya lokal	383	8.011		
2.	Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya	Kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	524.274.585	508.581.250	v	
3.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Kegiatan Sosialisasi Pengelola kekayaan Budaya Lokal daerah	357.358.000	254.876.340		v
4.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	2.135.995.000	2.008.269.665	v	
		Kegiatan pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama	1.613.073.909	1.602.258.110	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.7 semua program menunjang pencapaian kecuali program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan sosialisasi pengelola kekayaan budaya lokal daerah belum menunjang pencapaian dengan anggaran Rp. 357.358.000 dan realisasi Rp. 254.876.340.

Tabel 1.8
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Objek Tradisi yang dilestarikan	Rumpun/objek	4	1	25.00%
2.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	6.899.582	4.960.512	71.89%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.8 dapat dilihat bahwa Jumlah objek tradisi yang dilestarikan hanya terealisasi 1 (satu) dari target 4 (empat) atau sebesar 25.00%. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 4.960.512 atau sebesar 71.89%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.9

Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2017

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1.	Program pengembangan budaya	Kegiatan sosialisasi pengelola kekayaan	501.481.00	489.151.250	v	

		budaya lokal daerah				
		Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dll.	3.837.894.400	2.640.858.90		v
2.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	7.484.430.000	7.234.876.400	v	
		Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	2.368.660.000	2.325.960.000	v	
		Kegiatan seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya daerah	612.935.000	456.911.000		v
3.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	304.460.000	304.460.000	v	

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.9 program pengembangan budaya dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan lain lain dengan anggaran Rp. 3.837.894.400 dan realisasi Rp. 2.640.858.90 dan program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan

seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya daerah dengan anggaran Rp. 612.935.000 dan realisasi Rp. 456.911.000 belum menunjang pencapaian, sedangkan program lainnya sudah menunjang pencapaian sesuai dengan anggaran dan terealisasi dengan baik.

Tabel 1.10

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Objek Tradisi yang dilestarikan	Rumpun/objek	4	2	50.00%
2.	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	7.585.346	6.960.512	91.76%

Sumber : LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.10 dapat dilihat bahwa Jumlah objek tradisi yang dilestarikan hanya terealisasi 2 (dua) dari target 4 (empat) atau sebesar 50.00%. Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 6.960.512 atau sebesar 91.76%.

Tabel 1. 11
Program dan Kegiatan Serta Penganggaran Tahun 2018

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Sasaran	
					Menunjang pencapaian	Belum Menunjang pencapaian
1.	Program pengembangan nilai budaya	Kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	775.973.000	665.682.250		v
		Kegiatan pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	1.172.972.600	1.158.893.533	v	
		Bandung <i>design bienale</i>	975.200.000	975.200.000	V	
2.	Program pengelolaan kekayaan budaya	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dll.	1.372.983.333	1.367.072.800	v	
		Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	138.904.999	137.665.000	v	
		Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	614.561.400	577.031.860		v

		Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	5.882.400.000	5.185.480.000	v	
		Penyelenggaraan festival budaya daerah	9.082.289.956	9.082.118.000	v	
3.	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	213.054.500	-	-	-

Sumber: LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, 2019

Berdasarkan tabel 1.11 program pengembangan nilai budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dengan anggaran Rp. 775.973.000 dan realisasi Rp. 665.682.250 dan program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengelolaan karya cetak dan karya rekam dengan anggaran Rp. 614.561.400 dan realisasi Rp. 577.031.860 belum menunjang pencapaian, sedangkan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah dengan anggaran Rp. 213.054.500 tidak terlaksana.

Mencermati permasalahan di atas, dalam hal ini maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Birokrasi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun 2014-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Penggunaan anggaran belum optimal. Terlihat dari penggunaan anggaran yang memiliki selisih berlebih tetapi tidak semua program yang telah ditetapkan sebelumnya bisa terlaksana dan kurang menunjang pencapaian. Maka bisa dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum optimal.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum mencapai target atau kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal tersebut bisa dilihat bahwa kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum dilaksanakan secara optimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja birokrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan serta referensi keilmuan Administrasi Publik dalam hal pengkajian keuangan daerah khususnya yaitu mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja birokrasi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan keuangan daerah sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan pembandingan penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan keuangan daerah dan kinerja birokrasi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan menjadi bahan evaluasi terkait pengelolaan keuangan daerah pada anggaran pemerintahan daerah khususnya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Karianga (2017: 10) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pendapat lain mengenai pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 1 Ayat 5 adalah semua kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2010: 10-11) pengelolaan keuangan daerah memiliki prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang memiliki 5 dimensi diantaranya sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

b. *Value for Money*

Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*probity*)

Pengelolaan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

e. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, menurut Pasolong mendefinisikan kinerja adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil.

Selanjutnya untuk lebih menjelaskan mengenai kinerja birokrasi, menurut Duwiyanto dalam Pasolong (2014:178) untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, program, dan SKPD dapat digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output.

b. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik.

c. Responsivitas

Kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

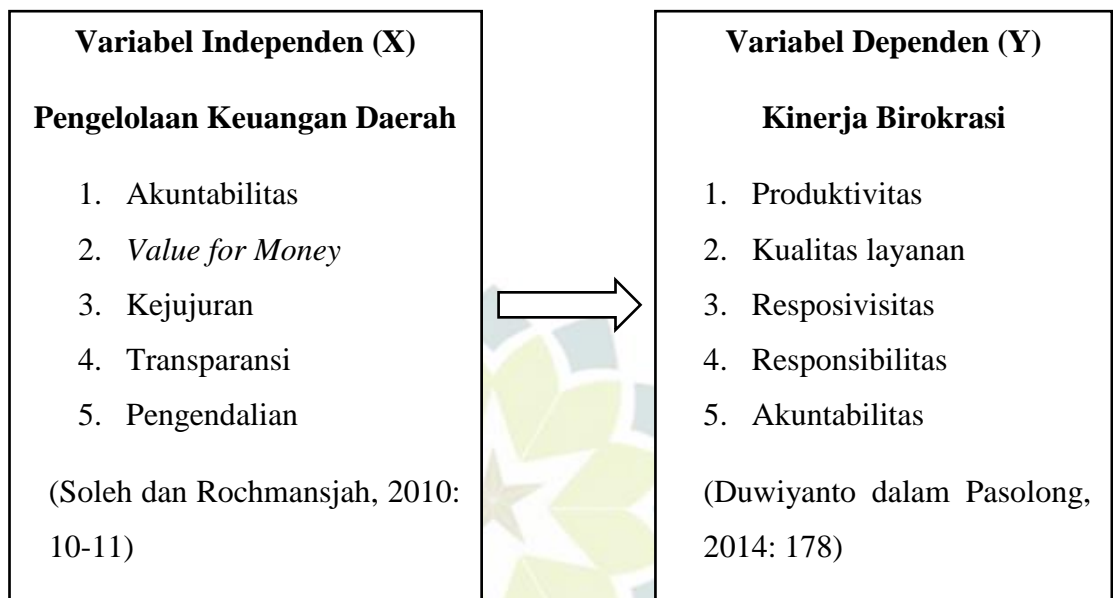
Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas

Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti tertarik untuk memecahkan masalah tersebut sesuai dengan identifikasi masalah dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Upaya untuk mencapai hal itu peneliti mencari teori pengelolaan keuangan daerah dan kinerja birokrasi sebagai landasan teoritik untuk diuji secara empiris. Melalui teori dan pengamatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi nyata untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kerangka berfikir tersebut maka penulis dapat menggambarkan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1
Model kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Hipotesis (Silalahi, 2015: 265) merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah kuantitatif. Karena itu sering dikemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian berhipotesis. Hipotesis adalah pernyataan dugaan (*conjectural*) tentang hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja birokrasi.

Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

H_a : Ada pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja birokrasi

H_o : Tidak ada pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja birokrasi

